



PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

“HA(M)RAPAN KABINET BARU”

Pada hari Selasa tanggal 9 November pukul 4 sore yang bertempat di ruang rapat Gedung Yos Sudarso, Departemen Kajian Aksi dan Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM FH UPNVJ) melaksanakan Diskusi Publik (Duplik) jilid II dengan mengangkat judul Ha(m)rapan Kabinet Baru. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pembicara yaitu pertama Arif Maulana yang merupakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), Kedua Dimas Bagus Arya yang merupakan Staf Divisi Pemantauan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) dan yang terakhir Bhagavad Sambadha yang merupakan founder Patron Syndicate. Acara ini dimulai dengan sambutan dari ketua pelaksana yang disampaikan oleh Fadhel Halilintar dalam sambutannya Fadhel menjelaskan tema diskusi publik jilid II dan berharap acara lancar.

Setelah penyampaian kata sambutan, acara dilanjutkan dengan diskusi yang di moderatori oleh Randyka Riza Pratama selaku Staff Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ. Dalam membuka diskusi, Randyka menyampaikan narasi pembuka yang menyebutkan Harapan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kabinet Baru era Jokowi Pada pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di depan sidang umum MPR ada dua isu utama yang tak disinggung presiden dalam pidato kenegaraan memasuki periode keduanya, yaitu masalah korupsi dan komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal itu seakan akan membuktikan tidak adanya komitmen serius dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Hal itu diperparah dengan dilantik terduga pelanggar HAM, Prabowo Subianto yang dilantik menjadi Menteri Pertahanan, seakan akan menambah ketidakseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun seakan akan rasa optimis akan adanya kejelasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu muncul kembali. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD pada (25/10/2019) memastikan akan membahas penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dinamika yang terjadi terkait dengan Kabinet Baru yang dilantik oleh Jokowi membuat gamang rakyat Indonesia, apakah benar pemerintah serius dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM di



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971
fax. 7656904 Email :BEM FHupnvj@gmail.com



periode kedua Jokowi? Akankah kasus pelanggaran HAM di periode kedua Jokowi akan menemui secercah harapan atau malah akan stagnan dan bahkan tak pernah bisa terselesaikan.

Belum lagi kasus pelanggaran HAM yang mencuat akhir akhir ini, seperti penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, kasus rasialisme terhadap masyarakat Papua, hingga kekerasan yang terjadi di Wamena yang hingga saat ini kasus kasus tersebut belum memiliki titik temu.

Setelah diskusi dibuka oleh moderator, Dimas Bagus Arya, selaku pembicara pertama menyampaikan materi untuk membuka diskusi kali ini. Dalam penyampaian materinya, Dimas menjelaskan bahwa cukup banyak pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pada masa lalu yang melibatkan pemerintah sebagai pelakunya. Tujuan dari dilakukannya pelanggaran HAM oleh pemerintah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melancarkan jalannya kekuasaan, pada konteks ini saat kekuasaan Soeharto. Namun, sudah sudah 21 tahun berlalu dan 5 presiden berganti semenjak Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden, pelanggaran pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah jelas bagaimana penyelesaiannya. Mulai dari tragedi 65, Tanjung priok 84, Talangsari 74, tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II dll tidak pernah ada solusi penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah yang berkuasa. Selain korban jiwa, keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kerugian (khususnya keluarga korban tragedi 65), mereka mengalami stigma negatif dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar, karena dianggap keluarga pengkhianat bangsa. Seharusnya negara hadir untuk memulihkan kembali hak hak keluarga korban tragedi 65 yang ditinggalkan, namun sampai saat ini pemerintah tidak ada perlindungan dan tindakan nyata untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga keluarga korban tragedi 65. Tidak adanya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelanggaran HAM ini karena tidak adanya kemauan dari pemerintah untuk mengungkap kasus kasus ini, padahal kasus kasus ini jika tidak diungkap oleh Bangsa Indonesia akan menjadi aib yang sangat lama yang seharusnya untuk menjadi negara besar Indonesia tidak boleh memiliki dosa di masa lalunya. Selain itu salah satu sebab mengapa Indonesia tidak berhasil mengungkap pelanggaran HAM masa lalu adalah karena adanya orang orang yang diduga pelanggar HAM dipelihara dan diberi kekuasaan yang strategis oleh Presiden kita saat ini. Jadi kemungkinan



pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia akan terungkap sangat kecil, karena orang-orang yang memiliki kekuasaan besar yang berada di lingkaran presiden adalah pelaku pelanggaran HAM pula.

Selanjutnya adalah penyampaian materi yang disampaikan oleh Arif Maulana, selaku pembicara kedua. Dalam penyampaian materinya, Arif Maulana mengatakan mangkraknya pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa lalu karena banyak faktor, salah satunya adalah orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan adalah orang-orang pelaku pelanggaran HAM, hal ini yang sangat menghambat dan membuat mangkrak pengungkapan kasus pelanggaran HAM. Contohnya pada saat periode pertama Joko Widodo beliau mengangkat Wiranto sebagai menkopolkum yang notabene terduga dalang terjadinya tragedi trisakti, tragedi semanggi I,II, pelanggaran HAM di Timor Timur dan menjadikan Hendropriyono sebagai anggota dewan pertimbangan presiden yang sebelumnya diduga sebagai dalang pembunuhan Munir dan aktor utama tragedi Talangsari tahun 1974. Impunitas sangat kentara praktiknya di masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Adanya juga kekhawatiran mengenai pasal 499 di RKUHP yang mengatur tentang genosida yang juga membuat tindak pidana genosida memiliki masa kadaluarsa selama 20 tahun, yang seharusnya tindak pidana genosida tidak memiliki waktu kadaluarsa. Jika pasal ini dimasukkan ke dalam KUHP dikawatirkan digunakan untuk melindungi orang-orang terduga pelaku pelanggaran HAM berat ini di lingkaran kekuasaan Jokowi. Jadi kemungkinan pelanggaran HAM terungkap di masa pemerintahan Jokowi sangat kecil karena terjadi impunitas di pemerintahan saat ini.

Selanjutnya adalah penyampaian materi terakhir yang disampaikan oleh Bhagavad Sambadha, selaku pembicara ketiga. Bhagavad menyatakan dalam paparannya mahasiswa harus hadir untuk membela kepentingan-kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Cara untuk mendorong pemerintah untuk menyelesaikannya adalah kita sebagai generasi muda harus mencari cara yang paling relate atau berhubungan, dekat dan efektif dalam menuntut ke pemerintah dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM. Kewenangan komisi nasional Hak Asasi Manusia juga harus ditambah jangan hanya berhenti di penyelidikan.



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

JL.RS.Fatmawati-PondokLabu Jakarta Selatan 12450 Telp. 7656971
fax. 7656904 Email :BEM FHupnvj@gmail.com



Setelah penyampaian materi oleh masing-masing pembicara, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh mahasiswa. Pada diskusi kali ini antusiasme mahasiswa sangat luar biasa, banyak pertanyaan yang diajukan ke pembicara.

Pada pukul 18.45, sebelum diskusi ditutup para pembicara menyampaikan kata-kata penutup. Setelah itu moderator menutup jalannya diskusi dengan menyampaikan kesimpulan diskusi kepada mahasiswa yang hadir diruangan tersebut.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan yang dilakukan oleh ketua pelaksana serta dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pukul 19.00 peserta diskusi meninggalkan ruang rapat Gedung Yos Sudarso.

